

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan retribusi di Pasar Oka sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap yang memungut retribusi. Aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah. Serta aspek pelayanan yang dirasakan sudah cukup baik walaupun ada beberapa fasilitas pelayanan yang masih kurang memadai. Penerimaan retribusi juga hampir 100% digunakan untuk pengelolaan pasar antara lain untuk gaji pegawai, biaya operasional dan biaya administrasi. Jika terjadi kelebihan maka akan dimasukkan kedalam biaya operasional.
2. Faktor-faktor pendukung dalam pemberian pelayanan publik yang baik adalah adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab Sedangkan hambatan yang dihadapi banyaknya PKL dan pedagang liar yang tidak berijin dan menambah ketidaknyamanan dan keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

## 6.2. Saran

### 1. Pemerintah

- a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara pedagang yang berijin dan tidak berijin.
- b. Pemerintah harus membangun lahan parkir sehingga pada saat hari pasar tidak terjadi kemacetan.

2. Pedagang harus tetap mempertahankan waktu pembayaran retribusi pasar sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pedagang dan petugas pemungut retribusi.

3. Masyarakat harus menggunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. misalnya tempat sampah yang sudah disediakan pemerintah sebik mungkin sehingga sampah tidak berserakan dimana-mana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Kaho, Josef, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M. Dimiyati. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud DIKTI.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Milles, Mathew dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Press.
- Sarudajang, S.H. 2003. *Birokasi dalam Otonomi Daerah; Upaya mengatasi kegagalannya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang –undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Wahab, Solichin Abdul. 1998. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif Dan Berkualitas*. Malang: Universitas Brawijaya Program Pasca Sarjana.
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Pasar: pengertian, fungsi, ciri-ciri dan jenisnya [internet], 27 Januari 2020, 12.00 [diakses 20 April 2020]. Tersedia dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/120000769/pasar-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-jenisnya>.